

**ANALISIS YURIDIS ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA
PERSETUBUHAN ATAS DASAR KESEPAKATAN BERSAMA
BERDASARKAN PRINSIP KEPENTINGAN TERBAIK MENURUT
UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2012 (STUDI KASUS PUTUSAN
NOMOR 5/PID.SUS-ANAK/2021/ PN SGR)**

Oleh:

Nyoman Prayudhi Trianggana

Program Studi Ilmu Hukum

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk (1) mengetahui bentuk atau wujud perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pesetubuhan atas dasar keputusan bersama berdasarkan prinsip kepentingan terbaik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak; dan (2) mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terkait kasus persetubuhan dilakukan oleh anak atas dasar kesepakatan bersama, yang merujuk pada putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sgr. Jenis penelitian yang digunakan hukum normatif dengan pendekatan kasus dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pesetubuhan harus berlandaskan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak, dengan memberikan kesempatan rehabilitasi dan reintegrasi sosial. (2) Dalam perkara No. 5/Pid.Sus/2021/PN.Sgr, putusan ini lebih mengarah pada aspek punitif dan berpotensi bertentangan dengan prinsip peradilan anak yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, yang dapat berisiko mengarah pada perilaku kriminal, sehingga tidak mencerminkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum yang seimbang bagi terdakwa anak.

Kata Kunci: Pelaku anak, Persetubuhan, Prinsip Kepentingan Terbaik

**LEGAL ANALYSIS OF CHILDREN AS PERPETRATORS OF THE
CRIMINAL ACT OF INTERCEPTION ON THE BASIC BASIS OF MUTUAL
AGREEMENT BASED ON THE PRINCIPLE OF BEST INTEREST
ACCORDING TO LAW NO. 11 OF 2012 (CASE STUDY OF DECISION
NUMBER 5/PID.SUS-ANAK/2021/PN SGR)**

By:

Nyoman Prayudhi Trianggana

Law Department Program

ABSTRACT

This study was conducted with the aim of (1) knowing the form or form of legal protection for children as perpetrators of sexual intercourse based on a joint decision based on the principle of best interests in accordance with the provisions of Law Number 11 of 2012 concerning the juvenile criminal justice system; and (2) knowing the basis for the judge's considerations in making decisions related to cases of sexual intercourse carried out by children based on mutual agreement, which refers to decision Number 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sgr. The type of research used is normative law with a case approach and statutory regulations. The results of the study show that (1) legal protection for children as perpetrators of sexual intercourse must be based on the principle of the best interests of the child, by providing opportunities for rehabilitation and social reintegration. (2) In case No. 5/Pid.Sus/2021/PN.Sgr, this decision is more directed at the punitive aspect and has the potential to conflict with the principles of juvenile justice which prioritize the best interests of the child, which can risk leading to criminal behavior, so that it does not reflect justice, legal certainty, and balanced legal benefits for child defendants.

Keywords: Child Offenders, Sexual Intercourse, Best Interest Principl